

Analisis Semiotika pada Pidato Prabowo dalam Merespons Aksi Demonstrasi

Dilfa Karina Fasya^{1*}

Dadang S. Anshori²

Ahmad Fu'adin³

¹²³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

¹dilfakarina@upi.edu

²dadanganshori@upi.edu

³ahmadfuadin@upi.edu

Abstrak

Aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 memicu respons politik dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto melalui serangkaian pidato resmi yang menimbulkan kritik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan prinsip arbitraritas tanda Ferdinand de Saussure yang dilakukan secara strategis untuk merekontekstualisasi makna “demonstrasi” dalam wacana politik Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan data transkrip pidato yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi penanda berupa kata-kata kunci seperti “demonstrasi”, “anarkis”, “huru-hara”, “makar”, “terorisme”, “demonstran murni”, dan “anasir-anasir”; kemudian menginterpretasi petanda dengan membaca makna denotatif dan konotatifnya; serta menelusuri bagaimana hubungan antara penanda dan petandanya mengalami pergeseran makna melalui strategi linguistik sebagai dampak dari sifat arbitraritas tanda. Temuan analisis menunjukkan tiga tahap rekontekstualisasi yang menetapkan pemaknaan dominan terhadap demonstrasi sebagai ancaman keamanan nasional. Ketiga tahap tersebut diantaranya: (1) konstruksi oposisi biner antara demonstrasi dan ketertiban, (2) eskalasi atau peningkatan ancaman dari “anarkis”, ke “makar”, hingga “terorisme”, dan (3) kategorisasi atau diferensiasi moral antara “demonstran murni” dan “anasir-anasir”. Penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman teoretis terkait dimensi sosial-politik arbitraritas Saussure serta memberi kesadaran kritis tentang penggunaan bahasa sebagai instrumen kontrol sosial-politik.

Kata Kunci: *arbitraritas tanda, rekontekstualisasi makna, semiotika*

Pendahuluan

Fenomena kebahasaan pada pidato Prabowo dalam merespons aksi demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menunjukkan adanya upaya penggeseran sudut pandang terhadap cara demonstrasi digambarkan melalui pemakaian pilihan kata. Penggeseran sudut pandang yang dimaksud ini tidak tampak melalui kata demonstrasi secara eksplisit, tetapi melalui diksi-diksi yang menyertainya seperti “anarkis”, “makar”, “terorisme”, hingga “anasir-anasir”, yang secara keseluruhan membentuk cara baru dalam melihat dan memahami demonstrasi. Fenomena kebahasaan ini menjadi krusial untuk diteliti karena penggunaan diksi bermuatan negatif tersebut memicu kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. KBR.id dalam artikelnya pada Kamis, 4 September 2025, melaporkan bahwa penyebutan makar dan terorisme dalam pidato Presiden Prabowo menuai kritik dari kalangan mahasiswa hingga pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran untuk membuktikan tuduhan makar dan

terorisme supaya tidak hanya menjadi dugaan dan prasangka semata yang dapat berpengaruh buruk terhadap jalannya demokrasi. Ketegangan yang tercipta dari penggunaan istilah-istilah keamanan negara yang digunakan sebagai instrumen untuk melabeli gerakan sipil dalam sebuah narasi publik, menunjukkan adanya upaya pendefinisian ulang atau rekontekstualisasi makna terhadap gerakan sipil sebagai ancaman keamanan. Dalam konteks tersebut, rekontekstualisasi diartikan sebagai proses pemindahan dan transformasi yang dinamis dari konteks asli ke konteks yang baru (Linell, 1998) karena adanya kebutuhan untuk selaras dengan tujuan tertentu, sehingga terbentuk makna atau realitas yang baru (Sterk & van Goch, 2023).

Dalam hal ini, tiga buah pidato Prabowo tidak hanya menjadi sebuah bentuk respons atau tanggapan terhadap situasi yang memanas, tetapi juga menunjukkan cara pandang pemerintah yang berubah-ubah terhadap demonstrasi itu sendiri. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih jauh karena sebagai salah satu bentuk wacana politik, pidato menjadi arena yang kaya akan simbol dan tanda (Supriatin & Napitupulu, 2025), serta dipenuhi oleh dominasi kepentingan tertentu (Kodoati, 2023) yang menjadikan pidato tidak lagi dipahami sebagai struktur bahasa yang netral (Imran et al., 2024; Sitorus et al., 2025). Bahasa dalam pidato politik kontemporer menjadi media yang penting di mana suatu makna dan pandangan diciptakan, diperdebatkan, hingga disebarluaskan untuk mewujudkan tujuan politik tertentu (Maulany & Jelantik, 2023).

Dalam kurun waktu yang singkat, rangkaian pidato Prabowo menghadirkan fenomena kebahasaan yang krusial dengan memperlihatkan bahwa bahasa politik tidak semata-mata menjadi alat penyampaian pesan (Mailani et al., 2022; Rumaf et al., 2025) antar individu atau anggota masyarakat, tetapi juga menjadi media untuk membentuk persepsi dan realitas sosial (Nur et al., 2025), sekaligus strategi membangun legitimasi kekuasaan (Harmoko & Purwaningrum, 2025; Ilham et al., 2023). Hal ini terlihat jelas pada ketegangan makna yang muncul akibat penyandingan diksi bermuatan berat dengan istilah “demonstrasi” pada pidato, sehingga, proses pergeseran makna signifikan dapat terjadi sesuai dengan kepentingan penutur (Fajri, 2024). Secara teoretis, penelitian ini berpangku pada semiotika Ferdinand de Saussure yang memandang tanda sebagai sebuah kesatuan yang terikat secara arbitrer antara penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Fenomena pergeseran atau rekontekstualisasi ini dimungkinkan karena adanya sifat arbitrer dalam hubungan penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) sebagaimana dikonsepsikan oleh Saussure (Che Ningwei, 2023). Perspektif semiotika Ferdinand de Saussure tentang hubungan antara penanda (*signifier*) yang berupa bunyi fonem bahasa dan petanda (*signified*) yang merupakan konsep atau makna yang dihasilkannya (Aulia & Sakinah, 2025; Sobur, 2016) digunakan bukan hanya sebagai definisi, melainkan sebagai landasan teoretis untuk memahami bagaimana istilah yang semula memiliki konotasi positif seperti partisipatif dan demokratis, digeser menjadi istilah yang berasosiasi dengan kekacauan, kriminalitas, dan ancaman terhadap negara.

Fenomena rekontekstualisasi makna ini menempatkan “demonstrasi” sebagai penanda (*signifier*) yang maknanya (*signified*) mengalami perubahan nilai tanda dari representasi tindakan rakyat menjadi ancaman stabilitas nasional hingga adanya pemisahan untuk membentuk identitas antara kelompok yang sah dan tidak sah dalam ruang demokrasi. Hal ini mengungkapkan bahwa hubungan penanda dan petanda bersifat arbitrer (Saussure, 1959) atau mana suka (Jadidah et al., 2023; Yani et al., 2025), sehingga dapat diubah sesuai konteks (Kusnadin et al., 2025) sosial-politik yang melatarbelakanginya. Sifat arbitrer yang dimaksud membuat makna suatu kata atau istilah bergantung pada kesepakatan sosial yang berlaku dan disetujui dalam lingkup suatu masyarakat (Muin et al., 2021).

Arbitraritas atau ketidakstabilan makna menjadi peluang strategis bagi aktor sosial untuk mengaburkan batas moral dan mengarahkan publik untuk menafsirkan sesuatu sesuai narasi yang dikehendaki (Gershon, 2025). Arbitraritas terlihat dalam pidato Prabowo ketika difungsikan untuk menyandingkan kata “demonstrasi” dengan diksi atau kata berkonotasi negatif seperti “anarkis”, “makar”, “terorisme”, hingga “anasir-anasir”. Penggandengan diksi ini berpotensi merekonseptualisasikan “demonstrasi” yang memiliki makna literal sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum menjadi ancaman terhadap stabilitas negara. Dengan mengendalikan makna dan asosiasi kata, pemerintah mampu mengarahkan persepsi publik terhadap suatu isu (Sibuea et al., 2025) dan menentukan pihak yang harus dipercaya atau patut dicurigai. Analisis terhadap relasi penanda dan petanda dalam pidato Prabowo menjadi penting karena dapat mengungkapkan bagaimana proses rekontekstualisasi makna dan konstruksi identitas mampu berperan dalam memengaruhi persepsi publik terhadap aksi demonstrasi.

Kajian semiotika yang menggunakan teori Ferdinand de Saussure terhadap pidato politik pernah dilakukan Simamora & Pamungkas, (2023) dalam mengungkap maksud dari pernyataan “setelah ini jatah Prabowo” dalam pidato Presiden Jokowi yang menimbulkan beragam tafsir di masyarakat melalui unsur penanda dan petanda. Haq & Anoe-grajekti (2024) menunjukkan bagaimana Ganjar Pranowo memberikan pesan mendalam pada pidatonya di KPU tentang keadaan politik di Indonesia yang penuh kontroversi melalui pilihan tanda dan konstruksi makna. Meskipun kedua penelitian tersebut menganalisis pidato politik menggunakan teori Ferdinand de Saussure, analisis yang dilakukan masih terbatas pada mengidentifikasi penanda dan petanda secara statis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada eksplorasi terhadap sifat arbitrer tanda. Arbitraritas tanda merupakan faktor penting terutama dalam terjadinya proses rekontekstualisasi makna yang dilakukan aktor politik. Dengan sifat manasuka tersebut, aktor politik dapat memanfaatkannya untuk menggeser gerakan massa yang semula dipahami sebagai bentuk aspirasi demokrasi, menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, mekanisme pergeseran istilah hukum ini tidak dapat dijelaskan secara tuntas tanpa melibatkan konsep arbitraritas tanda.

Peneliti berupaya untuk menganalisis rekontekstualisasi makna “demonstrasi” dalam tiga pidato Prabowo melalui perspektif semiotika Ferdinand de Saussure, dengan fokus pada bagaimana hubungan arbitrer antara penanda dan petanda dimanipulasi secara strategis untuk membentuk persepsi publik dan melegitimasi tindakan politik terhadap demonstran. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol sosial dan politik.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada data teks (Creswell & Creswell, 2023) dengan tujuan memahami makna mendalam (Ardiansyah & Muhaimin, 2024) yang tidak mampu dijangkau oleh pendekatan kuantitatif (Azmi et al., 2025) dari penggunaan bahasa dalam komunikasi politik. Objek penelitian yang digunakan berupa pidato Presiden Prabowo yang diunggah pada 29 Agustus 2025, 31 Agustus 2025, dan 1 September 2025 sebagai kasus spesifik untuk memahami mekanisme arbitraritas dan analisis yang detail secara kontekstual terhadap rekontekstualisasi makna dalam komunikasi politik. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama sesuai teori semiotika Ferdinand de Saussure, antara lain, (1) Penanda dan

petanda, yaitu mengidentifikasi bentuk material tanda (bunyi atau tulisan kata) dan konsep mental yang dirujuk oleh tanda tersebut dalam konteks pidato; (2) Arbitraritas tanda, yaitu menelusuri bagaimana hubungan konvensional antara penanda dan petanda dimanipulasi atau digeser untuk menciptakan makna baru yang sesuai dengan kepentingan politik; dan (3) Implikasi pembentukan persepsi publik, yaitu menganalisis bagaimana rekontekstualisasi makna melalui manipulasi tanda berkontribusi pada legitimasi tindakan politik dan pembatasan ruang demokratis.

Teknik utama pengumpulan data adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa transkrip data tekstual yang diperoleh melalui video (Maryani et al., 2025; Sadiyah et al., 2025). Transkrip diperoleh dari sumber resmi dan telah diverifikasi akurasi dengan membandingkan rekaman video asli. Setelah transkrip terkumpul, dilakukan analisis dokumen untuk mengidentifikasi unit-unit analisis yang relevan berupa unsur kebahasaan pada level frasa yang memiliki fungsi strategis dalam pembingkai makna, khususnya diksi yang berkaitan dengan istilah bermuatan politik seperti demonstrasi, makar, anasir, aspirasi murni, dan rakyat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi penanda berupa kata kunci yang relevan seperti "demonstrasi," "anarkis," "huru-hara", "makar," "terorisme," "demonstrasi murni," dan "anasir-anasir", yang muncul dan menempati posisi strategis dalam pidato. Kedua, interpretasi petanda, yaitu membaca makna denotatif dan konotatif penanda tersebut dalam konteks kalimat dan rangkaiannya. Sebagai contoh, secara denotatif "demonstrasi" merujuk pada aksi penyampaian pendapat di muka umum, tetapi ketika disandingkan dengan penanda "tindakan anarkis" dan "huru-hara", maka penanda ini mengaktifkan petanda konotatif demonstrasi sebagai sumber kekacauan dan ancaman terhadap ketertiban. Ketiga, analisis arbitraritas, yaitu menelusuri bagaimana hubungan antara penanda "demonstrasi" dan petandanya digeser secara bertahap dari makna demokratis menjadi makna ancaman kriminal dan ideologis dalam ketiga pidato. Misalnya, eskalasi istilah dari "anarkis" pada pidato pertama menjadi "makar" dan "terorisme" pada pidato kedua, hingga pelabelan "anasir-anasir" pada pidato ketiga. Hasil temuan dari proses analisis data tersebut kemudian dibahas dan disimpulkan untuk mengungkap pemanfaatan arbitraritas tanda pada sebuah wacana politik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang dinamika bahasa pidato secara sistematis.

Hasil

Analisis tiga pidato Prabowo pada tanggal 29 Agustus 2025, 31 Agustus 2025, dan 1 September 2025 menunjukkan sebuah pola rekontekstualisasi makna "demonstrasi" yang terjadi secara konsisten dan bertahap. Secara umum, temuan dari penelitian ini menunjukkan pergeseran makna demonstrasi dari gejolak sosial yang dikaitkan dengan ketidaktertiban dan kekerasan, tereskalasi menjadi ancaman hukum bersifat bersyarat, hingga adanya kategorisasi moral dan identitas "kita" versus "mereka" yang dikaitkan dengan ancaman terhadap kedaulatan negara. Pola tersebut tampak karena pemilihan dan penyandingan penanda seperti "anarkis", "huru-hara", "makar", "terorisme", "demonstrasi murni", dan "anasir-anasir" dengan "demonstrasi" yang ditempatkan secara strategis dalam ketiga pidato.

Dalam pidato pertama Prabowo yang disampaikan pada 29 Agustus 2025, penanda "demonstrasi" muncul dalam satu rangkaian dengan penanda "tindakan-tindakan anarkis" melalui pernyataan, *"Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi yang mengarah*

kepada tindakan-tindakan anarkis" (00.12-00.25). Lebih lanjut, pada menit (02.17-02.22), adanya penyebutan *"Unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos"*, juga secara eksplisit mengaitkan situasi demonstrasi yang terjadi dengan narasi "kerusuhan". Masih dalam pidato yang sama, Prabowo menyatakan bahwa, *"Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita."* (02.25-02.33). Frasa "tidak menguntungkan" yang diulang sebanyak tiga kali pada level yang berbeda, dari rakyat, masyarakat, dan bangsa, menunjukkan peningkatan cakupan makna dari level insiden spesifik ke level kepentingan nasional yang dikaitkan juga dengan kekacauan dan kekerasan karena penempatan "demonstrasi" dalam rantai tindakan-tindakan anarkis → huru-hara → *chaos* → kerusuhan. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, pidato pertama menunjukkan adanya penyandingan "demonstrasi" dengan medan leksikal kekacauan dan kekerasan, serta perluasan dampak demonstrasi dari ranah rakyat, masyarakat, dan bangsa.

Pada pidato kedua, tanggal 31 Agustus 2025 pernyataan Prabowo bahwa *"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat"* (03.00-03.12) dan *"Saudara-saudara sekalian, sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi"* (07.25-07.43), memunculkan dua penanda kunci berupa "aspirasi murni" dan "berkumpul secara damai" sebagai ciri demonstrasi yang diakui keberadaannya. Namun, ketika pengakuan tersebut diikuti dengan klausa bersyarat seperti *"Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis destabilisasi negara merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa... Hal itu merupakan pelanggaran hukum"* (06.13-06.49), maka demonstrasi yang memiliki unsur "anarkis", "destabilisasi negara", "merusak fasilitas umum", dan "korban jiwa" kemudian dikategorikan sebagai "pelanggaran hukum". Adanya penegasan Prabowo pada pernyataan, *"Namun kita tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah terhadap mengarah kepada makar dan terorisme."* (07.46-08.10), secara empirik membentuk rantai tindakan diluar hukum → melawan hukum → hingga mengarah kepada makar dan terorisme. Dengan demikian, pidato kedua menunjukkan adanya peningkatan atau eskalasi penanda dari "tindakan-tindakan anarkis" dan "huru-hara" menuju "pelanggaran hukum", hingga "makar" dan "terorisme".

Dalam pidato ketiga tanggal 1 September 2025, Prabowo menyampaikan keterangan setelah mengunjungi rumah sakit yang merawat petugas dan masyarakat korban demonstrasi. Pernyataan, *"Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikkan pangkat luar biasa... karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, iya kan, menghadapi anasir-anasir"* (02.02-02.20), menunjukkan kemunculan penanda "anasir-anasir" untuk menyebut pihak yang dianggap sebagai pelaku kekerasan dalam aksi demonstrasi. Pada menit (02.20-02.40), Prabowo menegaskan bahwa *"Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi"* karena *"Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang"*. Pernyataan tersebut membentuk kategori eksplisit "demonstran murni yang baik", yaitu kelompok demonstran yang taat aturan dan pantas mendapat perlindungan aparat.

Selanjutnya, melalui pernyataan *"Tapi ada sekelompok orang ini yang terencana, datang ke suatu tempat bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang"*, Prabowo tampak membedakan kelompok demonstran murni sebelumnya dengan "sekelompok orang terencana" yang dinilai datang dari luar dan bertujuan menimbulkan kekacauan. Menurutnya, tindakan seperti itu bukan lagi bentuk penyampaian pendapat, tetapi upaya yang merusak kehidupan rakyat dan

tergolong “tindakan makar”. Pernyataan lain, “*Empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar, ini bukan penyampaian aspirasi*” (06.51–07.08), juga memperkuat pandangannya bahwa para ASN tersebut adalah “orang tidak bersalah” yang patut dilindungi. Melalui data tersebut, dapat diketahui, aparat bersama ASN diposisikan sebagai “rakyat tidak bersalah” yang layak dipuji atas pengorbanan mereka dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan, pidato ketiga ini memperlihatkan konstruksi kategorisasi aktor yang tegas. Demontran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “demontran murni yang baik” yang taat hukum dan berhak mendapat perlindungan, serta “anasir-anasir” yang dianggap melakukan tindakan makar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan melalui ketiga rangkaian pidato Prabowo dalam merespons aksi demonstrasi, secara teoretis, analisis ini berangkat dari prinsip arbitraritas tanda Saussure yang menegaskan bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak bersifat alamiah, melainkan ditentukan oleh konvensi sosial yang dapat berubah sesuai konteks penggunaannya. Gasparri et al., (2022) menyatakan bahwa pemahaman terhadap arbitraritas sebagai ketiadaan hubungan natural antara bentuk dan makna tidak dapat dipahami secara sederhana dan dianggap “acak” atau “sembarang”; sebab sistem yang bersifat relasional dan kontekstual ini mampu mengalami perubahan melalui praktik sosial serta dimotivasi oleh tujuan komunikatif tertentu.

Pemahaman ini relevan karena penelitian ini membaca pidato Prabowo sebagai praktik diskursif yang memanfaatkan sifat arbitraritas tersebut secara strategis, sehingga dapat memberi penjelasan tentang bagaimana perubahan makna “demonstrasi” pada ketiga pidato Prabowo tidak hanya terjadi secara kebetulan, akan tetapi disebabkan oleh pergeseran makna akibat konteks pemakaiannya yang mengalami perubahan dalam situasi sosial-politik tertentu. Kim, (2020) mengungkapkan bahwa teori Saussure memiliki dimensi sosial-politik yang memungkinkan analisis terhadap bahasa yang tidak sekadar menjadi sebuah alat komunikasi semata, tetapi juga instrumen untuk membentuk realitas politik. Melalui pemahaman tersebut, Gershon, (2025) memperluasnya melalui konsep ketidakpastian semiotik (*semiotic indeterminacy*), yang menjelaskan bahwa makna tanda bersifat cair dan terbuka terhadap interpretasi baru terutama pada sebuah wacana politik, yang mana, untuk membentuk suatu persepsi dan legitimasi, ambiguitas tanda justru dimanfaatkan secara strategis oleh aktor politik. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan menunjukkan bahwa perubahan makna “demonstrasi” pada ketiga pidato Prabowo bukanlah sebuah fenomena netral, melainkan strategi yang dilakukan aktor politik dengan memanfaatkan hubungan antara penanda-petanda yang bersifat dinamis dan arbitrer untuk dieksploitasi secara terstruktur.

Analisis Penanda dan Petanda “Demonstrasi”

Pada pidato pertama, secara denotatif “demonstrasi” merujuk pada aksi penyampaian pendapat di muka umum, akan tetapi ketika penanda ini disandingkan dengan “tindakan-tindakan anarkis”, “huru-hara”, dan “*chaos*”, maka petanda konotatif yang muncul adalah demonstrasi merupakan sumber kekacauan dan ancaman terhadap stabilitas. Dengan hal ini, rangkaian penanda kemudian membentuk oposisi biner antara “ketertiban” dan “demonstrasi”, yang secara langsung merepresentasikan demonstrasi sebagai gejala sosial yang merugikan rakyat, masyarakat, dan bangsa.

Dalam kerangka Gasparri et al., (2022), pilihan diksi seperti "anarkis," "huru hara," dan "*chaos*" sama sekali tidak dapat dianggap sembarangan karena setiap pilihan kata dimotivasi oleh praktik sosial dan tujuan retorik untuk membingkai peristiwa demonstrasi, sehingga arbitraritas hubungan penanda-petanda justru digunakan oleh aktor politik sebagai ruang strategis untuk memanipulasi makna sesuai kepentingan. Pergeseran makna ini semakin jelas ketika adanya pengulangan "tidak menguntungkan" pada tiga level berbeda yakni rakyat-masyarakat-bangsa, yang memberikan efek dalam menguatkan petanda negatif untuk mengukuhkan makna demonstrasi sebagai tindakan anti-nasional. Dengan demikian, pidato pertama menjadi tahap awal rekontekstualisasi karena makna demonstrasi mulai digeser dari sebuah ruang demokrasi menuju ruang ancaman keamanan nasional melalui pemanfaatan arbitraritas tanda secara strategis.

Pidato kedua yang disampaikan pada 31 Agustus 2025, menampilkan kompleksitas yang lebih tinggi dengan menghadirkan pengakuan formal terhadap hak berdemo sambil secara bersamaan membatasi dan mendelegitimasi praktik tersebut. Penanda "aspirasi murni" dan "berkumpul secara damai", secara denotatif menunjuk pada bentuk demonstrasi yang tertib dan sah, serta mengakui legitimasi demonstrasi. Namun, dengan hadirnya klausa bersyarat seperti "*Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis destabilisasi negara merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa... Hal itu merupakan pelanggaran hukum*" menunjukkan bagaimana pengakuan terhadap hak berdemo segera diikuti oleh pembatasan yang ketat.

Dengan mengaitkan demonstrasi pada penanda "anarkis", "destabilisasi negara", dan "merusak fasilitas umum", demonstrasi dikeluarkan dari kategori petanda sah menuju petanda "pelanggaran hukum", sehingga ruang legitimasi demonstrasi menjadi semakin sempit dan terlalu terkontrol. Secara konotatif, penanda-penanda tersebut membagi demonstrasi menjadi "yang dapat diterima" dan "yang tidak dapat diterima" sehingga menciptakan kategori bersyarat bahwa demonstrasi hanya sah sejauh selama pelaksanaannya "murni" dan "damai".

Selain daripada itu, hal paling menonjol secara semiotik pada pidato kedua adalah peningkatan penanda dari "anarkis" menjadi "makar" dan "terorisme". Pemilihan penanda "makar" dan "terorisme" bukan sebuah pilihan kosakata yang netral, melainkan strategi semiotik yang mengaktifkan petanda ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan nasional, yang jauh lebih serius daripada jika menggunakan pilihan kosakata "pelanggaran" atau "perlawanan". Dalam gagasan Gershon, (2025) tentang ketidakpastian semiotik (*semiotic indeterminacy*), ambiguitas antara "aspirasi murni" dan "makar" menciptakan zona ketidakpastian yang dapat dieksploitasi secara politik, di mana makna "demonstrasi" tidak lagi stabil sebagai hak demokratis tetapi menjadi medan kontestasi antara partisipasi sah dan ancaman terhadap ketertiban.

Demonstrasi yang sama dapat diposisikan sebagai aspirasi atau makar tergantung strategi dan kepentingan politik. Ifan et al., (2025) menegaskan bahwa pemilihan penanda spesifik dalam wacana politik berfungsi membentuk kesepakatan sosial tentang apa yang dianggap sebagai ancaman dan apa yang dianggap sebagai hak, sehingga demonstrasi tidak lagi dipahami dalam kerangka partisipasi demokratis, melainkan dalam kerangka ancaman kriminal dan ideologis. Pidato kedua ini, menandai betapa intensifnya perubahan atau rekontekstualisasi makna dari demonstrasi sebagai bentuk gejolak sosial pada pidato pertama menjadi sebuah ancaman kedaulatan yang membutuhkan respons tegas terhadap keamanan negara.

Pada 1 September 2025, unggahan pidato ketiga merupakan puncak dari proses rekontekstualisasi makna dengan menghadirkan kategorisasi moral secara eksplisit

melalui penanda “demonstran murni yang baik” dan “anasir-anasir”, yang semakin menegaskan pembelahan demonstran menjadi dua kelompok yang kontras. Secara denotatif, “demonstran murni yang baik” merujuk pada peserta aksi yang damai dan sesuai undang-undang. Secara konotatif, penanda ini mengandung petanda kepatuhan, legitimasi, dan memiliki hak atas perlindungan negara. Sebaliknya, penanda “anasir-anasir” secara denotatif merujuk pada kelompok yang melakukan tindakan perusakan dan kekerasan, sementara itu secara konotatif penanda tersebut menciptakan petanda ancaman, musuh, dan pihak yang sah untuk mendapat tindak kekerasan. Melalui oposisi ini, penanda “demonstrasi” oleh Prabowo tidak lagi merujuk pada satu praktik sosial tunggal yang sah, tetapi terpecah menjadi dua, yakni partisipasi sah, dan ancaman subversif. Pembagian menjadi dua kelompok yang berlawanan ini bukan sekedar memberi label atau pengelompokan semata, tetapi juga merupakan konstruksi identitas untuk menentukan pihak mana yang baik (*in-group*) dan pihak mana yang jahat (*out-group*).

Konteks pidato ketiga yang disampaikan saat Prabowo mengunjungi rumah sakit untuk melihat petugas yang cedera juga memberikan dimensi emosional yang kuat pada pembentukan makna. Pernyataan Prabowo yang meminta aparat yang terluka untuk dinaikkan pangkatnya tidak hanya menciptakan viktimisasi aparat sebagai korban kekerasan, tetapi juga membangun citra kepahlawanan aparat yang telah “membela rakyat” dari “anasir-anasir”. Schulze, (2023) dalam analisisnya tentang konstruksi konsep ‘country’ dan ‘people’ dalam pidato politik menunjukkan bagaimana penanda seperti “rakyat” dan “anasir” bukan sekedar label netral, tetapi penanda yang bermuatan nilai tertentu dan berfungsi untuk membedakan antara “kita” (kelompok yang dianggap baik) dan “mereka” (kelompok yang dianggap buruk). Dalam konteks ini, penanda “rakyat” memuat nilai sebagai pihak yang tertib, tidak berpolitik praktis, dan mendukung pemerintah, bahkan aparat yang cedera sekalipun dalam bentrokan turut dilabeli sebagai “rakyat” tidak bersalah yang harus dilindungi hingga diberikan apresiasi karena telah menghadapi anasir-anasir. Sebaliknya, demonstran yang cedera dalam bentrokan yang sama dapat dilabeli sebagai “anasir-anasir” yang diidentikkan dengan pihak merusak dan menentang pemerintah hanya karena tidak sejalan atau menunjukkan protes terhadap pemerintah; padahal secara objektif keduanya terlibat dalam bentrokan yang sama tetapi diberi label yang berbeda. Inilah salah satu bentuk pemanfaatan arbitraritas tanda sehingga pada pidato ketiga ini, kombinasi antara konteks emosional (kunjungan ke rumah sakit), viktimisasi aparat, dan kategorisasi moral secara eksplisit menciptakan sistem tanda yang saling berkaitan untuk mendelegitimasi demonstrasi sebagai praktik demokratis dan melegitimasi tindakan represif pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat.

Arbitraritas Tanda

Pergeseran makna “demonstrasi” dari pidato pertama hingga ketiga menunjukkan bagaimana arbitraritas hubungan penanda-petanda dapat dikontrol secara strategis dan sistematis untuk membingkai realitas sesuai kepentingan politik. Arbitraritas tanda dalam konteks penelitian ini beroperasi dalam dua dimensi yang saling terkait. Pertama, arbitraritas horizontal yang terlihat dari kemampuan penanda yang sama (demonstrasi) dalam menciptakan makna yang berbeda tergantung konteks penggunaannya. Dalam pidato pertama, “demonstrasi” dimaknai sebagai gejolak sosial; dalam pidato kedua, dimaknai sebagai ancaman bersyarat terhadap negara; dan dalam pidato ketiga, dimaknai sebagai arena diferensiasi moral dan identitas. Kedua, arbitraritas vertikal berupa pergeseran makna “demonstrasi” yang terlihat dari waktu ke waktu melalui tiga tahap terstruktur. Tahap pertama menunjukkan konstruksi awal oposisi antara demonstrasi dan ketertiban; tahap kedua menghadirkan pembenaran bersyarat dan upaya pembatasan

makna demonstrasi yang luas seperti hak partisipasi demokratis menjadi sebuah "ancaman"; dan tahap ketiga memperlihatkan kategorisasi moral dan diferensiasi identitas *in-group* dan *out-group*. Setiap tahap yang ada, menegaskan bahwa hubungan antara penanda dan petanda bersifat konvensional, sebagaimana yang diperjelas oleh Gasparri et al., (2022) melalui prinsip arbitraritas Saussure. Hal ini menunjukkan praktik wacana yang terstruktur memiliki kekuatan untuk membentuk ulang makna secara dinamis.

Pemanfaatan arbitraritas tanda menciptakan terjadinya rekontekstualisasi makna, di mana penanda yang sama diberikan petanda yang baru untuk menghasilkan makna baru sesuai konteks dan kepentingan. Sejalan dengan itu, Leeuwen, (2005) juga menjelaskan bahwa rekontekstualisasi merupakan proses ketika praktik sosial dipindah dari konteks aslinya ke konteks baru, yang direpresentasikan ulang sesuai kepentingan konteks yang baru. Dalam konteks wacana politik, demonstrasi sebagai praktik sosial dapat di rekontekstualisasi dari konteks aslinya sebagai hak konstitusional dan bentuk partisipasi politik, ke dalam konteks baru melalui wacana politik sebagai ancaman keamanan nasional.

Rekontekstualisasi yang terjadi pada penelitian terhadap ketiga pidato Prabowo bukan sekedar pemindahan netral, melainkan merupakan proses konstruksi makna baru dengan kepentingan dan tujuan tertentu. Hal ini dipertegas oleh pendapat Weizman, (2023) yang menyatakan bahwa proses ini dipahami sebagai pembentukan strategis (*strategic molding*) terhadap situasi dan teks terdahulu untuk diintegrasikan ke dalam wacana lain. Dengan demikian, makna asal demonstrasi yang berupa bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum tidak sepenuhnya hilang, melainkan dimanipulasi secara strategis untuk membentuk interpretasi baru yang sejalan dengan tujuan politik seorang aktor politik, seperti dengan menyandingkan penanda negatif untuk melahirkan petanda atau makna yang negatif.

Implikasi Pemanfaatan Arbitraritas Tanda

Implikasi signifikan dari strategi bertahap komunikasi ini terletak pada pemanfaatan arbitraritas tanda dalam merekontekstualisasi makna "demonstrasi" pada wacana politik berupa pidato. Perubahan penanda dari istilah "anarkis" pada pidato tanggal 29 Agustus 2025, ke istilah yang bermuatan negatif yaitu "makar" dan "terorisme" pada pidato tanggal 31 Agustus 2025 menunjukkan upaya yang disengaja untuk meningkatkan skala ancaman di mata publik bahwasanya aksi demonstrasi yang terjadi merupakan ancaman. Berdasarkan semiotika Saussure, arbitraritas tanda atau ketiadaan hubungan alamiah antara penanda dan petanda yang diwakilinya, memungkinkan aktor politik untuk memiliki kebebasan dalam menggunakan penanda yang mereka inginkan seperti menyandarkan penanda negatif pada "demonstrasi".

Arbitraritas tanda dijadikan sebagai senjata oleh aktor politik untuk menggiring publik menerima narasi bahwa aksi demonstrasi yang terjadi merupakan tindakan negatif atau ancaman ketertiban umum daripada sebagai sebuah bentuk partisipasi demokratis rakyat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak hanya itu, pembentukan diferensiasi atau memisahkan penanda dan petanda homogen menjadi dua kelompok yang berbeda antara "aspirasi murni" dan "anasir-anasir" pada pidato 1 September 2025, memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme pemisahan diskursif. Mekanisme pemisahan diskursif ini merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan bahasa dan wacana (diskursus) untuk memisahkan subjek yang semula hanya satu (demonstrasi) menjadi dua kategori kubu yang berlawanan. Sejalan dengan hal itu, Byessonova & Gordienko, (2021) menjelaskan bahwa diskursus atau wacana, memiliki sumber daya yang mampu memengaruhi pembentukan opini seorang individu maupun kelompok, sehingga diskursus

juga dapat menciptakan polarisasi melalui oposisi biner "kita/mereka"; yang mana tindakan kelompok "kita" dianggap sebagai tindakan yang "benar" dan "baik", sedangkan tindakan kelompok "mereka" adalah tindakan yang "salah" atau "buruk". Dalam pidato tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pengendalian kritik supaya pemerintah tidak di cap sebagai anti-demokrasi atau anti-rakyat setelah hadirnya penanda negatif yang bersanding dengan penanda "demonstrasi" pada pidato kedua, serta melegitimasi tindakan represif terhadap kelompok yang diberikan label negatif agar pemerintah juga terhindar dari dicap menindas keras seluruh rakyat yang berdemonstrasi.

Dengan demikian, menjadi masuk akal mengapa pada pidato ketiga, pemisahan kelompok antara "demonstran murni" dan "anasir-anasir" atau mekanisme pemisahan diskursif ini terjadi. Apa yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk mengendalikan kritik terhadap pemerintah, melegitimasi tindakan represif, serta mengendalikan narasi publik supaya mulai tidak fokus hanya pada tuntutan dan alasan demonstrasi terjadi (yakni tuntutan terkait tunjangan anggota DPR), tetapi juga terpecah fokusnya pada identitas siapa yang baik (*in-group*) dan siapa yang jahat (*out-group*).

Simpulan

Hasil analisis rekontekstualisasi makna menunjukkan bahwa Prabowo memanfaatkan prinsip arbitraritas tanda sebagai instrumen strategis untuk membentuk persepsi publik dan melegitimasi tindakan politik terhadap demonstran. Analisis menunjukkan bagaimana Prabowo memanfaatkan prinsip arbitraritas tanda untuk memperkuat dan menormalisasi citra negatif demonstrasi sekaligus mendelegitimasi makna positif demonstrasi sebagai hak demokratis yang diperjuangkan sejak Reformasi. Dengan pemanfaatan arbitraritas tanda, proses rekontekstualisasi terjadi melalui tiga tahap strategi yang terstruktur. Tahap pertama (pidato 29 Agustus 2025) membangun oposisi biner dengan menghubungkan penanda "demonstrasi" dengan serangkaian penanda negatif seperti "anarkis," "huru-hara," dan "*chaos*," sehingga menggeser petanda dan makna demonstrasi dari partisipasi demokratis masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional. Tahap kedua (pidato 31 Agustus 2025) menghadirkan kompleksitas yang lebih tinggi melalui pengakuan formal terhadap hak berdemonstrasi yang segera diikuti pembatasan ketat menggunakan kualifikator "murni" dan "damai," serta eskalasi penanda dari "anarkis" menjadi "makar" dan "terorisme" yang mengaktifkan petanda ancaman kedaulatan negara. Tahap ketiga (pidato 1 September 2025) menjadi puncak dengan adanya kategorisasi moral secara eksplisit antara "demonstran murni yang baik" versus "anasir-anasir," sehingga menciptakan diferensiasi identitas *in-group* (rakyat yang tertib dan mendukung pemerintah) dan *out-group* (pihak yang merusak dan menentang pemerintah).

Terdapat dua dimensi arbitraritas tanda yang beroperasi, yakni arbitraritas horizontal yang memungkinkan penanda yang sama menghasilkan makna berbeda sesuai konteks penggunaan, dan arbitraritas vertikal yang menunjukkan pergeseran makna secara bertahap dan terstruktur dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, implikasi dari adanya perubahan makna yang terjadi pada rangkaian pidato Prabowo dalam merespons aksi demonstrasi yang terjadi ialah memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan persepsi, narasi, hingga tindakan publik terhadap aksi demonstrasi yang terjadi. Pemanfaatan arbitraritas tanda dalam merekontekstualisasi makna "demonstrasi" pada ketiga pidato menegaskan bahwa bahasa dalam wacana politik bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan instrumen pembentukan realitas politik yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan kontrol sosial. Implikasi yang telah dijabarkan sebelumnya masih merupakan

dugaan sementara yang memerlukan pembuktian apakah perubahan makna serta penggunaan penanda negatif mampu memberikan dampak signifikan terhadap persepsi publik, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan memberikan pemahaman lebih dalam melalui sisi dampak serta implikasi dari pemanfaatan bahasa pada wacana politik terutama pidato.

Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa prinsip arbitraritas Saussure memiliki dimensi sosial-politik yang signifikan, di mana ketidakpastian semiotik (*semiotic indeterminacy*) justru menjadi zona yang dapat dieksploitasi secara strategis oleh aktor politik untuk memilih atau memaksakan penanda sehingga dapat membentuk kesepakatan sosial tentang apa yang dianggap sebagai ancaman dan apa yang dianggap sebagai hak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap mekanisme teknis pergeseran makna, tetapi juga memperingatkan akan bahaya penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial yang bisa saja mengikis ruang demokrasi dan partisipasi sipil.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat-Nya sehingga artikel ini dapat dituntaskan dengan baik. Penulis menyampaikan apresiasi terdalam kepada Bapak Prof. Dr. Dadang S. Anshori, M.Si. dan Bapak Ahmad Fu'adin, M.Pd. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan dedikasinya selama proses penulisan artikel. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pengampu mata kuliah pada semester 7 atas saran dan motivasi berharganya. Serta secara khusus, penulis mempersembahkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua atas dukungan moral dan do'a yang tiada henti sehingga artikel ini dapat diselesaikan hingga tuntas.

Daftar Pustaka

- Alyaaulia, D., & Sari, A. Y. (2025). Dampak Pidato Presiden yang Sebut Makar dan Terorisme dalam Aksi Demonstrasi. *KBR.Id*. <https://kbr.id/articles/ragam/dampak-pidato-presiden-yang-sebut-makar-dan-terorisme-dalam-aksi-demonstrasi>
- Ardiansyah, F., & Muhaimin. (2024). Analisis Komunikasi Politik dalam Kampanye Pemilu: Pendekatan Kualitatif terhadap Strategi dan Dampaknya di Media Sosial. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1112–1117. <https://doi.org/10.56672/5G3J3K39>
- Aulia, F. H., & Sakinah, M. (2025). Identification and typology of political signs in Indonesia: A semiotic approach to political communication. *Lililacs Journal*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.21009/LILILACS.051.01>
- Azmi, Z. K., Sulistyani, A., & Fitri, A. A. (2025). Analisis Pesan Nasionalisme Dalam Orasi Ilmiah Syaykh Panji Gumilang Pada Wisuda Iai Al-Azis 2023 Menurut Ferdinand De Saussure. *Journal of Islamic Studies*, 2(5), 502–511. <https://doi.org/10.61341/JIS/V2I5.106>
- Byessonova, O., & Gordienko, E. (2021). Binary opposition “us/them” in British and American media texts about conflicts. *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*, 18(2), 91. <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:154450682?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:154450682>
- Che Ningwei. (2023). Understanding the Principle of Arbitrariness From the Perspective of Saussure's Theory Linguistics. *US-China Foreign Language*, 21(3). <https://doi.org/10.17265/1539-8080/2023.03.001>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design*. California. SAGE Publication.
- Fajri, A. (2024). *Analisis Wacana Kritis Atas Pemaknaan Lafaz Auliyâ" Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019 Kemenag RI*.
- Gasparri, L., Filippi, P., Wild, M., & Glock, H. J. (2022). Notions of arbitrariness. *Mind and Language*, 38(4), 1120–1137. <https://doi.org/10.1111/MILA.12443>
- Gershon, I. (2025). The Political Uses of Semiotic Indeterminacy. *Signs and Society*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.1017/SAS.2024.7>
- Haq, M. F. U., & Anoegrajekti, N. (2024). Analisis Semiotik Pidato Ganjar Pranowo Pada Penetapan Nomor Urut Calon Presiden Di KPU. *Jurnal Skripta*, 10(1), 28–36. <https://doi.org/10.31316/SKRIPTA.V10I1.5961>
- Harmoko, D. D., & Purwaningrum, P. W. (2025). Simbolisme Politik dan Narasi Keberlanjutan: Studi Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden RI Ke 7 Joko Widodo. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 10(1), 54–66. <https://doi.org/10.51673/Jurnalistrendi.V10I1.2415>
- Ifan, M., Sudartinah, T., Wiedarti, P., Widodo, P., Sulistiana, E., & Azhari, A. (2025). Systematic Repressive System: An Analysis of Legal Instruments as a Tool to Silence Criticism by the Indonesian Government. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 11(1), 374–389. <https://doi.org/10.22219/KEMBARA.V11I1.38555>
- Ilham, Anshari, & Amir, J. (2023). Representasi Kekuasaan dalam Pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1423–1436. <https://doi.org/10.30605/ONOMA.V9I2.2363>
- Imran, Sultan, & Mayong. (2024). Wacana Politik Identitas dalam Pidato Calon Presiden RI 2024. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(2), 1864–1876. <https://doi.org/10.30605/ONOMA.V10I2.3618>
- Jadidah, I. T., Pramudita, V. P., Kiftiah, M., Bela, S., & Isnaini, F. (2023). Analysis of the Use of Slang in Indonesian Among Teenagers. *SIGNIFICANT: Journal Of Research And Multidisciplinary*, 2(02), 151–159. <https://doi.org/10.62668/SIGNIFICANT.V2I02.860>
- Kim, M. S. (2020). Saussure and the Political Potential of Language. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 36(1), 1–23. <https://doi.org/10.26593/MEL.V36I1.4678.1-23>
- Kodoati, M. C. (2023). Urgensi Etika bagi Komunikasi Politik. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 4(2), 179–214. <https://doi.org/10.53396/MEDIA.V4I2.202>
- Kusnadin, S. A., Musdalipa, & Haliq, A. (2025). Semantik dalam Terjemahan: Tantangan dan Strategi dalam Mempertahankan Makna Asli. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 407–426. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I02.24971>
- Leeuwen, T. Van. (2005). *Introducing Social Semiotics*. London. Routledge.
- Linell, P. (1998). *Approaching Dialogue*. Amsterdam. John Benjamins.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuardi, J. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. *Kampret Journal*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.35335/KAMPRET.V1I1.8>
- Maryani, S., Hakim, F., Nurjamilah, A. S., & Lisnawati, I. (2025). Kesalahan Morfologis Pada Kanal Youtube Gaming Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 21(1), 264–283. <https://doi.org/10.25134/FON.V21I1.11454>
- Maulany, N. N., & Jelantik, S. K. (2023). Komunikasi Politik Dalam Konteks Sejarah. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.53977/JSV.V2I2.1313>

- Muin, F., Noortyani, R., & Elyani, E. P. (2021). Rethinking arbitrariness of language and its implication in language use. *Cogent Arts & Humanities*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1868687>
- Nur, A. M., Muftadisa, Y., Takbir, Z. Z., Ilham, F., Niam, M. D., & Mamut, M. I. (2025). Kekuatan Bahasa dalam Memengaruhi Persepsi: Analisis Semantik dan Pragmatik Terhadap Isu Ijazah Jokowi di Media Digital. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 348–358. <https://doi.org/10.51577/IJIPUBLICATION.V5I3.760>
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., Fatihaturrahmah, S., & Jumroh, A. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(2), 2111–2124. <https://doi.org/10.30605/ONOMA.V11I2.5790>
- Sadiyah, H., Anshori, D. S., & Sastromiharjo, A. (2025). Konstruksi Realitas Politik Hukum Indonesia dalam Podcast Bocor Alus Politik Tempo.Co. *Fon : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 21(1), 177–193. <https://doi.org/10.25134/FON.V21I1.11302>
- Saussure, F. De. (1959). *Course In General Linguistics* (C. Bally & A. Sechehaye (eds.)). New York. Philosophical Library.
- Schulze, R. (2023). ‘Coloring the Utterance with Some Kind of Perceivable Affect’: Constructing ‘Country’ and ‘People’ in Speeches by Theresa May and Boris Johnson – A Linguistic Perspective. *Affective Polarisation*, 60–77. <https://doi.org/10.51952/9781529222289.CH003>
- Sibuea, P., Manila Guci, R., Ivan, A., & Hsb, A. (2025). Diksi Dan Makna Dalam Komunikasi: Pilar Konseptual Dalam Perkembangan Masyarakat Digital Kontemporer. *Development: Journal of Community Engagement*, 4(1), 267–280. <https://doi.org/10.46773/DJCE.V4I1.2103>
- Simamora, J., & Pamungkas, S. (2023). Analisis Semiotik Pidato Presiden Jokowi Terkait “Setelah Ini Jatah Prabowo” Sebagai Calon Presiden 2024. *PRecious: Public Relations Journal*, 2(2), 152–168. <https://doi.org/10.24246/PRECIIOUS.V2I2.8409>
- Sitorus, R. Y., Tarigan, R. A. B., Nahampun, D. Y., & Hutasoit, F. Y. N. (2025). Praktik Kekuasaan: Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Megawati Soekarno Putri. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 765–775. <https://doi.org/10.62710/86A1XR82>
- Sobur, A. (2016). *Semiotika Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sterk, F. M., & van Goch, M. M. (2023). Theoretical Considerations: Recontextualization and Reformulation in Popularization Discourse. *Re-Presenting Research*, 13–24. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28174-7_2
- Supriatin, A. R., & Napitupulu, F. (2025). Dekonstruksi Peran Diplomasi Perempuan Dalam Teks Pidato Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 8(1), 250–260. <https://doi.org/10.32509/PUSTAKOM.V8I1.5710>
- Weizman, E. (2023). Recontextualization practices: A scale of directness. *Frontiers in Communication*, 7. <https://doi.org/10.3389/FCOMM.2022.1062585>
- Yani, A., Syahfira, K. N., Siahaan, Y., Winkasari, T., & Harahap, M. (2025). Analisis Penggunaan Sarkasme pada Demonstrasi Indonesia Gelap 21 Februari 2025: Semiotika Ferdinand De Saussure. *EScience Humanity Journal*, 5(2), 365–378. <https://doi.org/10.37296/ESCI.V5I2.248>